



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

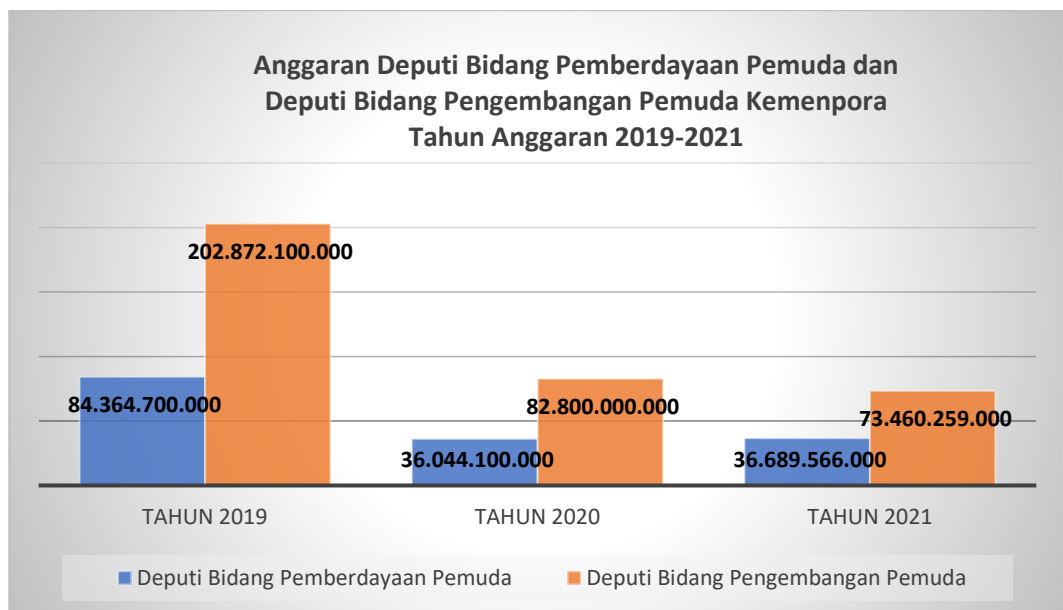
Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Eko Adityo Ananto
Widi Septuaji
Alfi Mufida Ahmad

Evaluasi Atas Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga

Isu Strategis

Definisi pemuda menurut Undang Undang No. 40 Tahun 2009 Pemuda adalah WNI berusia 16 sampai 30 tahun yang memasuki periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Pemuda adalah aset berharga untuk pembangunan negara kedepannya. Indikator kualitas kepemudaan diantaranya dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang menjadi tolak ukur pembangunan pemuda dalam RPJMN 2020-2024, IPP merupakan alat ukur pembangunan pemuda yang mempunyai lima domain dasar yaitu **Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi.**

Pemberdayaan Pemuda Indonesia menjadi salah satu andalan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia khususnya di daerah Terpencil, Tertinggal, Terbelakang (3T). Namun, dukungan anggaran untuk kepemudaan dirasa belum ideal kondisi ini dapat dilihat dari adanya penurunan pagu anggaran kepemudaan pada Kemenpora sebagai *leading sector* di bidang kepemudaan dari tahun 2019 s.d. 2021 sebagai berikut:

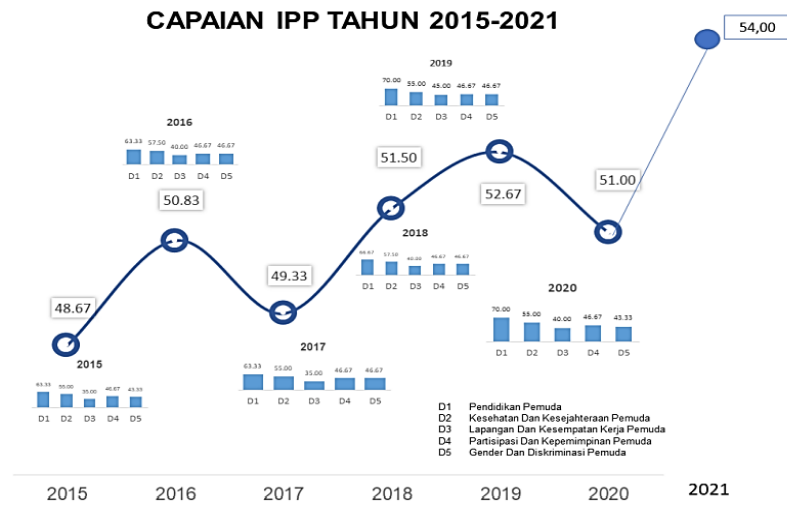


Sumber: LHP BPK Atas LK Kemenpora 2019-2020 dan DPR RI (diolah)

2022

Komisi X

Disamping penurunan anggaran, *outcome* IPP yang diharapkan dalam RPJMN 2020-2024 juga belum mencapai target yang diharapkan bahkan mengalami penurunan. Penurunan IPP tersebut nampak kontradiktif, dengan keuntungan bonus demografi yang dapat dibuktikan dari hasil Susenas BPS tahun 2021, sekitar 64,92 juta jiwa penduduk Indonesia atau 23,90% seperempat penduduk Indonesia berada di dalam kelompok umur pemuda, Namun, keuntungan bonus demografi tersebut tidak berdampak positif dimana masih terdapat kesenjangan atau gap yang ditunjukkan dalam Gambar Capaian IPP Tahun 2015-2021 sebagai berikut:



Sumber: Laporan Kinerja Kemenpora tahun 2021

Pada gambar capaian IPP diatas, Pada tahun 2015-2021 terjadi volatilitas atau naik turun, IPP yaitu pada tahun 2015 semula 48,67 kemudian pada tahun 2016 berubah menjadi naik 50,83 dan turun menjadi 49,33 pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan berturut-turut menjadi 51,50 dan 52,67 hingga pada 2020 menurun menjadi 51. Kemudian pada tahun 2021, IPP meningkat kembali menjadi 54,00 meski anggaran kepemudaan mengalami penurunan. Pada TA 2020, Pandemi Covid-19 menghambat perkembangan indikator pembentuk IPP dan menjadi faktor utama turunnya IPP. Terdapat pula permasalahan pada masing-masing domain yang ada pada IPP yaitu:

Domain pendidikan pemuda.

Berdasarkan data Susenas Maret 2020, terjadi disparitas akses terhadap pendidikan di kalangan pemuda perkotaan dan perdesaan namun dalam rentang yang tidak terlalu tinggi, di mana Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di perkotaan hingga mencapai 11,37 tahun (setara kelas 2 SMA). Sedangkan RLS pemuda di perdesaan baru mencapai 9,97 tahun atau setara kelas 3 SMP (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020 dalam Kemenpora, 2022). Untuk meningkatkan poin pada domain pendidikan dibutuhkan peningkatan Nilai rata-rata lama sekolah di atas 12 tahun, Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah di atas 90, dan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di atas 40.

Domain kesehatan dan kesejahteraan.

Masih tingginya prevalensi merokok pada pemuda, yaitu 25,70 persen pada tahun 2020. Tingginya prevalensi merokok berpotensi menghambat penurunan angka kesakitan pemuda. Disisi lain, muncul potensi adanya kasus HIV baru yang tidak terdeteksi mengingat terbatasnya layanan kesehatan di berbagai daerah.

Domain lapangan dan kesempatan kerja.

Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka pemuda, yang pada 2020 angkanya mencapai 15,23% berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional bulan Agustus 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut meningkat dari 13,03% pada 2019 akibat pembatasan aktivitas dan PHK selama pandemi.

Domain partisipasi dan kepemimpinan.

Keterlibatan pemuda di dalam organisasi masih sangat rendah, yaitu sekitar 6,36%. Angka yang juga rendah adalah partisipasi pemuda dalam menyampaikan aspirasi atau usulan pendapat, yaitu 6,72 persen. Adanya rasa tidak percaya diri, skeptisisme dan rasa takut menyampaikan pendapat merupakan beberapa alasan pemuda tidak berperan aktif dalam organisasi (*Indonesian Youth Council for Tobacco Control, 2021 dalam Kemenpora, 2022*).

Domain gender dan diskriminasi.

Persentase perempuan yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah dan perguruan tinggi mengalami kenaikan walau kenaikannya semakin mengecil (*slowing down*), yaitu dari 39,21 persen (2019) menjadi 39,37 persen (2020). Kondisi ini perlu diwaspadai karena berpotensi menurunkan penetrasi perempuan ke pasar kerja.

Secara wilayah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah dengan capaian IPP tertinggi sebesar 73,67 pada tahun 2021 yang mana melebihi rata-rata nasional sebesar 54,00. Untuk daerah dengan capaian IPP terendah pada tahun 2021 adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan IPP sebesar 46,50. Adapun dalam APBN TA 2022, anggaran kepemudaan adalah sebesar 183,9 miliar atau meningkat sebesar 67% dari TA 2021 sebesar 110,14 miliar. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi Kemenpora untuk dapat terus mengupayakan peningkatan IPP hingga mencapai target 57,67 pada 2024 nanti (Bappenas, 2020).

Disamping capaian kinerja IPP, Kemenpora juga perlu menerapkan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran kepemudaan agar akuntabel dan memberikan dampak. Terdapat temuan dalam penggunaan anggaran kepemudaan yang diungkap oleh BPK dalam LHP Atas LK Kemenpora Tahun 2019 dan Tahun 2020 yaitu potongan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2019 sebesar Rp110.660.049 dan pembayaran uang saku Rapat Dalam Kantor pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sebesar Rp149.407.500.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemuda yang ada di Indonesia ternyata harus terus dioptimalkan kualitasnya untuk menjadi aset penggerak pembangunan. Komisi X DPR RI perlu mengawal dan memonitoring efektivitas program kerja Kemenpora yang mendorong peningkatan IPP pada masing-masing domain yaitu:

- Domain pendidikan pemuda.** Melakukan monitoring atas efektivitas Program Pelatihan peningkatan potensi akademik pemuda kader tingkat nasional serta Tes Potensi Akademik (TPA) guna meningkatkan softskill pemuda guna mempermudah mendapat peluang beasiswa dan karir yang lebih baik.
- Domain kesehatan dan kesejahteraan.** Melakukan monitoring atas efektivitas Program Kader Pemuda Anti Narkoba dan program Pelatihan Peningkatan Kesehatan Reproduksi.
- Domain lapangan dan kesempatan kerja.** Melakukan monitoring atas efektivitas Program dan aktivitas dalam menggerakkan kewirausahaan (Pelatihan, pendampingan, pemagangan, pembimbingan, kemitraan, promosi, dan akses permodalan).
- Domain partisipasi dan kepemimpinan.** Melakukan monitoring atas efektivitas dan fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan.
- Domain gender dan diskriminasi.** Melakukan monitoring atas efektivitas pelatihan kesetaraan gender.

Selain memantau efektivitas program kerja yang mendorong peningkatan IPP, Komisi X DPR RI hendaknya dapat mempertimbangkan untuk mendorong peningkatan alokasi pagu anggaran bidang kepemudaan pada tahun-tahun yang akan datang. Diharapkan melalui peningkatan alokasi anggaran dan meningkatnya efektivitas program peningkatan IPP, IPP secara nasional akan meningkat dan daerah dengan IPP dibawah rata-rata nasional pada tahun 2021 (54,00) kedepannya akan mengalami peningkatan diantaranya adalah Sulawesi Barat (46,50), Kalimantan Barat (46,67), dan Sumatera Selatan (47,67).

Dalam hal tata kelola dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kepemudaan, Komisi X DPR RI perlu mengingatkan Menpora agar senantiasa mendorong jajarannya agar lebih berhati-hati dan optimal dalam melaksanakan pengawasan kegiatan dan anggaran kepemudaan dan atas penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, agar dapat segera disetorkan ke Kas Negara.

Referensi

- Bappenas (2020). Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia. Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PP/Bappenas
- Badan Pusat Statistik (2021). Statistik Pemuda Indonesia 2021. Jakarta; BPS
- BPK (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019. Jakarta; BPK
- BPK (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020. Jakarta; BPK
- DPR RI (2022). Komisi X DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021. Publikasi. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=6s7BZjD6d2E> pada 24 Agustus 2022
- Kemenpora (2022). Laporan Kinerja 2021. Jakarta;Kemenpora.
- Republik Indonesia (2022). Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan> pada 23 September 2022.

2022

Komisi X